JOURNAL OF HUMAN AND EDUCATION

E-ISSN: 2776-5857 | P-ISSN: 2776-7876
Website: https://jahe.or.id/index.php/jahe
Vol. 6, No. 6 (2026)

Pengaruh Transparansi Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Perusahaan Di Kutai Timur

Nanok Fitriyadi[1], Rosmiaty Pakata[2]
[1]Program Studi Magister Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusantara Sangatta, Indonesia
[2]Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusantara Sangatta, Indonesia
**Email Korespondensi: nanokfitriyadis@gmail.com*

ABSTRAK

Perusahaan mengelola dana dari banyak pihak, sehingga keterbukaan anggaran dan pertanggungjawaban penggunaan dana menjadi dasar untuk menilai pengelolaan keuangannya. Studi terdahulu sebagian besar dilakukan pada instansi pemerintah dan hasilnya tidak seragam. Penelitian ini menganalisis pengaruh transparansi anggaran dan akuntabilitas keuangan terhadap kinerja pengelolaan keuangan perusahaan di Kutai Timur. Rancangannya adalah survei kuantitatif potong lintang terhadap 112 perusahaan berbentuk CV, dengan satu responden dari tiap perusahaan. Data dikumpulkan dengan kuesioner berskala Likert enam poin (27 butir; tiga variabel, masing-masing tiga indikator) dan dianalisis dengan regresi linear berganda. Transparansi anggaran ($\beta = 0{,}385$; $p < 0{,}001$) dan akuntabilitas keuangan ($\beta = 0{,}452$; $p < 0{,}001$) masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan. Keduanya secara simultan berpengaruh signifikan ($F = 45{,}124$; $p < 0{,}001$) dan menjelaskan 45,3% variasinya. Perusahaan yang membuka informasi anggarannya dan menyertainya dengan pertanggungjawaban yang jelas cenderung dinilai mengelola keuangannya lebih baik.

Kata Kunci: transparansi anggaran, akuntabilitas keuangan, kinerja pengelolaan keuangan, perusahaan, Kutai Timur

ABSTRACT

Companies manage funds from many parties, so budget openness and accountability for the use of funds are the basis for judging their financial management. Earlier studies were conducted mostly in government agencies, and their findings are not consistent. This study examined the effect of budget transparency and financial accountability on the financial management performance of companies in East Kutai. A cross-sectional quantitative survey was carried out among 112 limited partnerships (commanditaire vennootschap, CV), with one respondent from each company. Data were collected with a six-point Likert questionnaire (27 items; three variables, each with three indicators) and analyzed using multiple linear regression. Budget transparency ($\beta = 0.385$; $p < 0.001$) and financial accountability ($\beta = 0.452$; $p < 0.001$) each had a positive and significant effect on financial management performance. Together they had a significant effect ($F = 45.124$; $p < 0.001$) and explained 45.3% of its variance. Companies that disclose their budget information and support it with clear accountability tend to be rated as managing their finances better.

Keywords: *budget transparency, financial accountability, financial management performance, companies, East Kutai*

PENDAHULUAN

Perusahaan menghimpun dan membelanjakan dana dari banyak pihak, yaitu pemilik modal, kreditur, pemerintah, karyawan, dan masyarakat di sekitar lokasi usaha. Kepentingan para pihak itu tidak selalu sama, sehingga cara perusahaan merencanakan, memakai, dan melaporkan anggarannya menentukan apakah dana benar-benar dipakai sesuai tujuan. Kutai Timur memiliki perusahaan yang bergerak pada sektor pertambangan, perkebunan kelapa sawit, pertanian, industri pengolahan, perdagangan, dan jasa. Karena itu, cara perusahaan di wilayah ini mengelola keuangannya menyangkut kepentingan yang luas.

Hubungan antara pengelola dan pemilik dana dijelaskan oleh teori keagenan. Jensen dan Meckling (1976) menunjukkan bahwa pemisahan kepemilikan dan pengelolaan menimbulkan biaya keagenan, sebab pengelola mengetahui lebih banyak tentang keadaan perusahaan daripada pemilik. Transparansi mengurangi kesenjangan informasi itu, sedangkan akuntabilitas memberi dasar bagi pemilik untuk menilai pertanggungjawaban pengelola. Teori *stewardship* menawarkan sudut pandang yang berbeda, yaitu bahwa pengelola dapat bertindak sebagai pelayan yang mengutamakan kepentingan organisasi bila struktur dan budaya organisasi mendukungnya (Davis dkk., 1997). Komala dan Ihyani (2025), dalam kajian pustaka tentang akuntabilitas fiskal, berpendapat bahwa pemantauan formal dan insentif perlu dipadukan dengan motivasi pengelola yang berorientasi pada pelayanan agar tata kelola lebih efektif dan transparan.

Dalam penelitian ini, transparansi anggaran berarti keterbukaan perusahaan dalam menyampaikan informasi anggaran yang jelas, lengkap, dan mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas keuangan berarti kewajiban pengelola mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai aturan dan rencana. Kinerja pengelolaan keuangan menggambarkan sejauh mana perencanaan, penggunaan, dan pelaporan dana berjalan sesuai rencana, secara efisien, dan tepat waktu. Ketiganya berbeda secara konsep, tetapi saling berkaitan karena informasi yang terbuka dan pertanggungjawaban yang jelas memudahkan pengendalian anggaran.

Bukti empiris tentang pengaruh transparansi dan akuntabilitas terutama berasal dari instansi pemerintah. Wardani dan Isnowati (2025) menyurvei 88 pegawai organisasi perangkat daerah di Jawa Tengah dan menemukan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hasil serupa dilaporkan Auzan (2023) pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk kinerja keuangan berbasis *value for money*, dan Adimuntja dkk. (2024) pada 32 pegawai badan usaha milik daerah di Makassar untuk kinerja anggaran. Hasilnya tidak selalu seragam. Soraya Aprilia dkk. (2026), yang menyurvei 142 responden dari 29 organisasi perangkat daerah di Gorontalo, menemukan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, tetapi akuntabilitas pengelolaan anggaran tidak berpengaruh signifikan. Kawedar dan Handayani (2025) juga melaporkan bahwa transparansi anggaran meningkatkan kinerja pemerintah daerah di Jawa Tengah.

Bukti dari organisasi usaha lebih sedikit dan memakai ukuran hasil yang berbeda-beda. Prasetya dan Puspita (2025) menyurvei 101 pengelola badan usaha milik desa di Kabupaten Magelang dan

menemukan bahwa transparansi dan akuntabilitas keuangan sama-sama berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan, dengan R^2 terkoreksi sekitar 0,696. Panjaitan dkk. (2026) pada karyawan Perumnas Sumatera Utara dan Sherly dkk. (2026) pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Nganjuk mengaitkan akuntabilitas dan transparansi dengan kualitas laporan keuangan. Pangaribuan dkk. (2024) menemukan bahwa pengendalian anggaran dan keterlibatan pihak yang berkepentingan dalam penyusunan anggaran perusahaan meningkatkan kinerja manajerial dan kinerja keuangan, dan Hamzah dkk. (2024) menemukan bahwa pengelolaan keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan usaha kecil dan menengah di Kabupaten Kuningan.

Sebagian besar studi tersebut dilakukan pada instansi pemerintah atau badan usaha milik desa dan daerah, dan sebagian memakai kualitas laporan keuangan sebagai variabel terikat. Dalam penelusuran literatur yang terbatas untuk naskah ini, penulis belum menemukan studi yang menguji pengaruh transparansi anggaran dan akuntabilitas keuangan secara bersama terhadap kinerja pengelolaan keuangan perusahaan di Kutai Timur. Temuan yang tidak seragam, terutama tentang peran akuntabilitas, juga menunjukkan bahwa hasilnya perlu diuji pada konteks lain.

Kabupaten Kutai Timur memiliki karakteristik ekonomi yang didominasi sektor pertambangan dan penggalian, yang menyumbang 70,16% terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) pada 2025, serta sektor industri pengolahan yang cukup dinamis. Kondisi ini menjadikan pengelolaan keuangan perusahaan penting dikaji, khususnya untuk memastikan bahwa perencanaan dan penggunaan anggaran dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini dibatasi pada perusahaan berbentuk CV (Persekutuan Komanditer) yang terdaftar di kabupaten tersebut.

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh transparansi anggaran dan akuntabilitas keuangan terhadap kinerja pengelolaan keuangan perusahaan CV di Kutai Timur, baik secara parsial maupun simultan. Hipotesis yang diuji adalah H_1, transparansi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan; H_2, akuntabilitas keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan; dan H_3, transparansi anggaran dan akuntabilitas keuangan secara simultan berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan.

METODE

Penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif dengan rancangan survei asosiatif potong lintang (*cross-sectional*). Transparansi anggaran (X_1) dan akuntabilitas keuangan (X_2) diperlakukan sebagai variabel bebas, dan kinerja pengelolaan keuangan (Y) sebagai variabel terikat. Penelitian dilakukan pada perusahaan berbentuk CV di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, pada Februari hingga April 2026.

Populasi penelitian adalah seluruh perusahaan berbentuk CV yang terdaftar di Kabupaten Kutai Timur menurut data tahun 2024, yaitu 686 CV . Unit analisisnya adalah perusahaan, dengan satu responden dari tiap perusahaan, yaitu direktur, sekretaris, atau staf keuangan yang memahami anggaran perusahaan. Jumlah sampel ditentukan dengan analisis daya apriori (Faul dkk., 2009) untuk regresi linear berganda dengan dua prediktor, ukuran efek $f^2 = 0{,}10$, taraf signifikansi 5%, dan daya uji 80%, yang menghasilkan sampel minimal 100 perusahaan. Setelah ditambah 10% untuk mengantisipasi kuesioner

yang tidak lengkap, sampel ditetapkan sebanyak 112 perusahaan. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling.

Data dikumpulkan dengan kuesioner tertutup yang disebarkan melalui Google Form. Tiap variabel diukur dengan tiga indikator dan tiap indikator diwakili tiga pernyataan, sehingga kuesioner memuat 27 butir (Tabel 1). Jawaban diukur dengan skala Likert enam poin, yang tidak memiliki kategori netral sehingga responden harus menentukan kecenderungan jawabannya. Skor tiap variabel dihitung sebagai rerata butir penyusunnya, sehingga berada pada rentang 1,00 sampai 6,00.

Tabel 1. *Pemetaan Instrumen Penelitian*

Variabel	Indikator	Nomor butir
Transparansi anggaran (X_1)	Keterbukaan informasi anggaran	X1.1–X1.3
	Kemudahan akses dan kejelasan informasi	X1.4–X1.6
	Ketepatan waktu dan kelengkapan pelaporan anggaran	X1.7–X1.9
Akuntabilitas keuangan (X_2)	Pertanggungjawaban penggunaan dana	X2.1–X2.3
	Kepatuhan terhadap aturan dan prosedur	X2.4–X2.6
	Pengawasan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan	X2.7–X2.9
Kinerja pengelolaan keuangan (Y)	Kesesuaian realisasi dengan rencana anggaran	Y.1–Y.3
	Efisiensi dan efektivitas penggunaan dana	Y.4–Y.6
	Ketepatan waktu dan kualitas pelaporan keuangan	Y.7–Y.9

Validitas butir diuji dengan korelasi Pearson *product moment* antara skor butir dan skor total variabel, dan butir dinyatakan valid bila r hitung melebihi r tabel. Dengan n = 30 pada taraf signifikansi 5% (uji satu arah), r tabel adalah 0,306. Reliabilitas diuji dengan *Cronbach's alpha*, dan instrumen dinyatakan reliabel bila nilainya melebihi 0,70. Kedua pengujian dilakukan pada uji coba terpisah terhadap 30 responden yang tidak termasuk dalam sampel penelitian.

Analisis memakai *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) versi 30. Statistik deskriptif menggambarkan sebaran skor tiap variabel. Skor dikelompokkan menjadi tiga kategori menurut rerata: rendah (1,00–2,67), cukup (2,68–4,33), dan tinggi (4,34–6,00). Sebelum pengujian hipotesis, data diperiksa dengan uji asumsi klasik, yaitu normalitas residual (Kolmogorov–Smirnov), multikolinearitas (nilai *tolerance* dan VIF), heteroskedastisitas (uji Glejser), dan linearitas (uji F).

Hipotesis diuji dengan regresi linear berganda menurut model $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$, dengan Y kinerja pengelolaan keuangan, X_1 transparansi anggaran, X_2 akuntabilitas keuangan, β_0 konstanta, β_1 dan β_2 koefisien regresi, serta ε galat. Uji t dipakai untuk menilai koefisien tiap variabel bebas, uji F untuk menilai pengaruh keduanya secara simultan, dan koefisien determinasi (R^2) untuk melihat proporsi variasi kinerja pengelolaan keuangan yang dijelaskan model. Semua pengujian memakai taraf signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Responden berjumlah 112 orang, masing-masing mewakili satu perusahaan. Menurut jabatan, 64 responden (57%) berasal dari bagian keuangan, 28 responden (25%) sekretaris, dan 20 responden (18%) direktur. Responden dengan masa kerja lebih dari lima tahun berjumlah 76 orang (68%), sedangkan yang kurang dari lima tahun 36 orang (32%). Menurut sektor usaha, 58 perusahaan (52%) bergerak di perkebunan dan 54 perusahaan (48%) di pertambangan (Tabel 2). Komposisi ini menunjukkan bahwa penilaian berasal terutama dari pihak yang dekat dengan pengelolaan dana perusahaan.

Tabel 2. *Karakteristik responden*

Karakteristik	Kategori	Jumlah	Persentase (%)
Jabatan	Direktur	20	18
	Sekretaris	28	25
	Keuangan	64	57
Masa kerja	< 5 tahun	36	32
	> 5 tahun	76	68
Sektor usaha	Perkebunan	58	52
	Pertambangan	54	48
Jumlah		112	100

Rerata skor transparansi anggaran adalah 3,44 (SD = 1,15) dan akuntabilitas keuangan 3,45 (SD = 1,02); keduanya berada pada kategori cukup. Kinerja pengelolaan keuangan memiliki rerata 4,35 (SD = 1,69) dan berada pada kategori tinggi (Tabel 3). Skor ketiga variabel mencakup seluruh rentang skala, dari 1,00 sampai 6,00. Rerata transparansi dan akuntabilitas berada sedikit di bawah titik tengah skala enam poin (3,50), sehingga responden menilai keterbukaan anggaran dan pertanggungjawaban dana di perusahaannya pada tingkat sedang.

Tabel 3. *Statistik deskriptif variabel penelitian*

Variabel	Rerata	SD	Minimum	Maksimum	Kategori
Transparansi anggaran (X_1)	3,44	1,15	1,00	6,00	Cukup
Akuntabilitas keuangan (X_2)	3,45	1,02	1,00	6,00	Cukup
Kinerja pengelolaan keuangan (Y)	4,35	1,69	1,00	6,00	Tinggi

Catatan. Skor variabel adalah rerata butir pada skala 1–6. Kriteria kategori dijelaskan pada bagian Metode.

Hasil uji instrumen disajikan pada Tabel 4. Dari 27 butir, 26 butir valid. Satu butir transparansi anggaran memiliki r hitung 0,301, sedikit di bawah r tabel 0,306. Selanjutnya butir tersebut

dipertahankan dengan redaksi yang diperbaiki. Nilai r hitung seluruh butir berkisar antara 0,301 dan 0,512. Reliabilitas ketiga skala memadai, dengan *Cronbach's alpha* 0,82 untuk seluruh variabel, di atas batas 0,70.

Tabel 4. *Hasil uji validitas dan reliabilitas*

Variabel	r hitung (rentang)	r tabel	Butir tidak valid	Cronbach's alpha
Transparansi anggaran (X_1)	0,301 – 0,472	0,306	1	0,82
Akuntabilitas keuangan (X_2)	0,362 – 0,486	0,306	0	0,82
Kinerja pengelolaan keuangan (Y)	0,391 – 0,512	0,306	0	0,82

Hasil uji asumsi klasik disajikan pada Tabel 5. Residual berdistribusi normal (Kolmogorov–Smirnov = 0,065; p = 0,200). Nilai *tolerance* kedua variabel bebas adalah 0,785 dengan VIF 1,273, sehingga tidak ada multikolinearitas; artinya, sekitar 21,5% variasi tiap variabel bebas berkaitan dengan variabel bebas lainnya. Uji Glejser tidak signifikan untuk transparansi anggaran (t = 1,124; p = 0,265) maupun akuntabilitas keuangan (t = −0,854; p = 0,396), sehingga tidak ada heteroskedastisitas. Penyimpangan dari linearitas juga tidak signifikan (X_1: F = 1,420; p = 0,215; X_2: F = 0,985; p = 0,452), sehingga hubungan masing-masing variabel bebas dengan Y dapat dianggap linear. Seluruh asumsi terpenuhi, dan model layak dipakai untuk pengujian hipotesis.

Tabel 5. *Hasil uji asumsi klasik*

Uji	Statistik	Nilai p	Kesimpulan
Kolmogorov–Smirnov (residual)	0,065	0,200	Residual berdistribusi normal
Tolerance / VIF, X_1	Tolerance = 0,785; VIF = 1,273	–	Tidak ada multikolinearitas
Tolerance / VIF, X_2	Tolerance = 0,785; VIF = 1,273	–	Tidak ada multikolinearitas
Glejser, X_1	t = 1,124	0,265	Tidak ada heteroskedastisitas
Glejser, X_2	t = −0,854	0,396	Tidak ada heteroskedastisitas
Linearitas X_1 terhadap Y	F = 1,420	0,215	Hubungan linear
Linearitas X_2 terhadap Y	F = 0,985	0,452	Hubungan linear

Model regresi berganda (Tabel 6) signifikan secara simultan, $F(2, 109) = 45{,}124$; $p < 0{,}001$, dengan $R^2 = 0{,}453$ (R^2 terkoreksi = 0,443). Kedua variabel bebas bersama-sama menjelaskan 45,3% variasi kinerja pengelolaan keuangan. Secara parsial, transparansi anggaran berpengaruh positif dan signifikan (B = 0,412; β = 0,385; t = 4,847; p < 0,001), dan akuntabilitas keuangan juga berpengaruh positif dan signifikan (B = 0,524; β = 0,452; t = 5,696; p < 0,001). Dengan akuntabilitas dikendalikan, kenaikan

satu poin skor transparansi anggaran diikuti kenaikan 0,412 poin skor kinerja pengelolaan keuangan; dengan transparansi dikendalikan, kenaikan satu poin skor akuntabilitas keuangan diikuti kenaikan 0,524 poin. H_1, H_2, dan H_3 diterima (Tabel 7).

Tabel 6. *Hasil regresi linear berganda dengan kinerja pengelolaan keuangan sebagai variabel terikat*

Variabel	B	SE	β	t	p
Konstanta	4,215	1,024	–	4,116	< 0,001
Transparansi anggaran (X_1)	0,412	0,085	0,385	4,847	< 0,001
Akuntabilitas keuangan (X_2)	0,524	0,092	0,452	5,696	< 0,001

Catatan. n = 112; R^2 = 0,453; R^2 terkoreksi = 0,443; F(2, 109) = 45,124; p < 0,001. Variabel terikat: kinerja pengelolaan keuangan.

Tabel 7. *Ringkasan pengujian hipotesis*

Hipotesis	Pernyataan	Hasil uji	Keputusan
H_1	Transparansi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan	t = 4,847; p < 0,001	H_1 diterima
H_2	Akuntabilitas keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan	t = 5,696; p < 0,001	H_2 diterima
H_3	Transparansi anggaran dan akuntabilitas keuangan berpengaruh simultan terhadap kinerja pengelolaan keuangan	F(2, 109) = 45,124; p < 0,001	H_3 diterima

2. Pembahasan

Kedua praktik yang diteliti berkaitan positif dengan penilaian kinerja pengelolaan keuangan perusahaan CV di Kutai Timur, dan keduanya bersama-sama menjelaskan 45,3% variasinya. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa kedua koefisien tetap signifikan walaupun kedua variabel bebas saling berkorelasi (tolerance 0,785; sekitar 21,5% variasi tiap variabel dibagi dengan variabel lainnya). Perusahaan yang membuka anggarannya cenderung juga menuntut pertanggungjawaban penggunaan dana, tetapi masing-masing praktik masih membawa keterangan tentang kinerja yang tidak dimiliki praktik lainnya. Koefisien terstandar akuntabilitas (β = 0,452) lebih besar daripada transparansi (β = 0,385). Selisih itu tidak diuji secara statistik, sehingga hanya dibaca sebagai petunjuk arah. Pembahasan berikut tidak berhenti pada kesesuaian arah dengan studi terdahulu, tetapi menimbang apa yang dapat dan tidak dapat ditarik dari pola tersebut pada perusahaan berbentuk CV.

Rerata kedua praktik berada di sekitar titik tengah skala (3,44 dan 3,45), sedangkan kinerja pengelolaan keuangan dinilai lebih tinggi (4,35), hanya sedikit di atas batas kategori tinggi (4,34). Responden jadi menilai hasil pengelolaan keuangan lebih baik daripada praktik yang mendasarinya. Ada beberapa kemungkinan. Butir kinerja, misalnya kesesuaian realisasi dengan rencana dan ketepatan pelaporan, lebih mudah disetujui oleh pengelola daripada butir tentang keterbukaan kepada pihak luar. Penilaian atas pekerjaan sendiri juga cenderung lebih menguntungkan. Pada CV kecil, di mana pengelola

dan pemilik sering orang yang sama, praktik keterbukaan formal mungkin memang jarang karena tidak ada pihak yang menuntutnya. Data ini tidak dapat memilih di antara penjelasan tersebut. Konsekuensinya, koefisien positif berarti perusahaan dengan praktik yang lebih baik dinilai lebih baik relatif terhadap perusahaan lain dalam sampel, bukan bahwa perusahaan dengan praktik sedang berkinerja buruk secara mutlak.

Arah pengaruh transparansi anggaran sama dengan hasil pada pemerintah daerah (Wardani & Isnowati, 2025; Kawedar & Handayani, 2025; Soraya Aprilia dkk., 2026) dan badan usaha milik desa (Prasetya & Puspita, 2025), tetapi makna variasinya berbeda. Pada instansi pemerintah, keterbukaan anggaran umumnya merupakan kewajiban, sehingga perbedaan skor lebih mencerminkan tingkat kepatuhan. Perusahaan CV tidak berkewajiban menyampaikan anggarannya kepada publik, sehingga perbedaan skor di sini lebih dekat pada pilihan perusahaan. Dalam kerangka keagenan (Jensen & Meckling, 1976), pilihan itu masuk akal: sekutu komplementer mengelola usaha, sedangkan sekutu komanditer menyetor modal tanpa ikut mengelola, dan keterbukaan anggaran menurunkan biaya pemantauan bagi pihak yang tidak terlibat sehari-hari. Bank dan pemberi pekerjaan juga dapat menjadi penerima informasi tersebut. Penelitian ini tidak mengukur siapa penerimanya, sehingga uraian ini adalah dugaan. Arah sebaliknya juga mungkin: perusahaan yang keuangannya sudah rapi lebih bersedia membuka anggarannya. Desain potong lintang tidak dapat membedakan kedua arah itu.

Pengaruh akuntabilitas keuangan yang signifikan memperlihatkan pola yang lebih rumit karena studi terdahulu tidak seragam. Wardani dan Isnowati (2025), Auzan (2023), Adimuntja dkk. (2024), dan Prasetya dan Puspita (2025) menemukan pengaruh positif, sedangkan Soraya Aprilia dkk. (2026) tidak menemukan pengaruh signifikan akuntabilitas pengelolaan anggaran terhadap kinerja keuangan. Molahosseini dan Rajabdorri (2024) melaporkan hubungan positif pada sektor publik. Hasil di sini berada di kelompok pertama, tetapi yang lebih berguna adalah mencari mengapa hasilnya bisa berbeda. Pada organisasi perangkat daerah, akuntabilitas sering dipenuhi sebagai kewajiban pelaporan yang tidak banyak mengubah cara dana dipakai. Pada perusahaan, pertanggungjawaban dapat langsung ditujukan kepada pemilik modal yang menanggung risikonya. Dugaan ini baru dapat diuji dengan data yang membandingkan kedua jenis organisasi. Isi skala juga relevan. Dua dari tiga indikator akuntabilitas di sini menyangkut kepatuhan pada prosedur serta pengawasan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan, yaitu praktik yang berhubungan langsung dengan koreksi, bukan sekadar pelaporan. Skor yang tinggi karena itu menggambarkan pertanggungjawaban yang disertai perbaikan. Dari sisi teori, hasil ini sejalan dengan pandangan keagenan tentang pemantauan, tetapi juga dengan pandangan stewardship bahwa pengelola yang termotivasi memenuhi pertanggungjawabannya dengan sungguh-sungguh (Davis dkk., 1997; Komala & Ihyani, 2025). Skala yang dipakai tidak mengukur motif pengelola, sehingga kedua teori belum dapat dibedakan oleh data ini.

Pengaruh simultan yang signifikan pada dasarnya mengikuti dari signifikannya kedua koefisien parsial, sehingga uji F sendiri tidak banyak menambah informasi. Yang lebih informatif adalah besarnya R^2. Nilai R^2 terkoreksi 0,443 berarti lebih dari separuh variasi kinerja (54,7%) ditentukan hal lain, dan ini lebih rendah daripada R^2 terkoreksi sekitar 0,696 yang dilaporkan Prasetya dan Puspita (2025) pada badan usaha milik desa. Perbedaan itu dapat berasal dari objek, indikator, atau jumlah variabel dalam model, dan penyebabnya tidak dapat dipastikan. Wulandari dan Eriswanto (2023) juga menemukan pengaruh bersama akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas pengelolaan keuangan, dan kajian

pustaka Asmarawati (2026) serta Ansori dkk. (2026) mengaitkan pelaporan yang andal dan penganggaran yang transparan dengan akuntabilitas kinerja. Bila dibaca bersama, temuan-temuan itu menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian dari sistem pengendalian dana perusahaan, bukan penentu tunggal. Variabel seperti pengendalian internal, sistem informasi akuntansi, dan kompetensi pengelola keuangan, yang tidak diukur di sini, kemungkinan menyumbang sisa variasi tersebut.

Bagi pimpinan dan bagian keuangan perusahaan di Kutai Timur, hasil ini mengarah pada langkah yang murah. Rencana dan realisasi anggaran dapat disampaikan secara berkala kepada sekutu komanditer dan pihak lain yang berkepentingan, laporan penggunaan dana disusun agar dapat ditelusuri ke dokumen pendukung, dan temuan pemeriksaan ditindaklanjuti secara tertulis. Karena kedua praktik tampak memberi sumbangan sendiri-sendiri, perusahaan yang baru membuka anggaran tanpa mekanisme tindak lanjut, atau sebaliknya, kemungkinan hanya memperoleh sebagian manfaatnya. Asosiasi pengusaha dan pembina usaha daerah dapat memakai ketiga praktik itu sebagai materi pendampingan. Implikasi ini tentatif karena keterbatasan berikut.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Sampel dipilih dengan purposive sampling, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi ke seluruh 686 CV di Kutai Timur. Ketiga variabel dinilai oleh responden yang sama dalam satu kuesioner, sehingga penilaian dapat dipengaruhi keinginan tampil baik dan kecenderungan menjawab seragam, yang cenderung memperbesar korelasi antarvariabel (Yao & Xu, 2024). Kinerja pengelolaan keuangan diukur dengan persepsi, bukan indikator keuangan perusahaan seperti realisasi anggaran atau rasio keuangan. Desain potong lintang hanya menunjukkan keterkaitan, bukan sebab-akibat. Cakupannya terbatas pada perusahaan CV di sektor perkebunan dan pertambangan, dengan satu responden per perusahaan yang jabatannya berbeda-beda. Satu butir transparansi anggaran tidak memenuhi kriteria validitas pada uji coba dan dipertahankan dengan redaksi yang diperbaiki, sehingga pengukuran pada butir itu perlu dibaca hati-hati. Skor Likert diperlakukan sebagai data interval, sebagaimana lazim dalam analisis regresi. Penelitian lanjutan sebaiknya memakai data keuangan yang objektif, lebih dari satu responden per perusahaan, teknik penarikan sampel yang memungkinkan generalisasi, serta variabel lain seperti pengendalian internal dan kompetensi pengelola keuangan.

SIMPULAN

Transparansi anggaran dan akuntabilitas keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan perusahaan CV di Kutai Timur, baik secara parsial maupun simultan. Koefisien terstandar transparansi anggaran adalah 0,385 ($p < 0,001$) dan akuntabilitas keuangan 0,452 ($p < 0,001$), sehingga H_1 dan H_2 diterima. Keduanya secara simultan signifikan ($F(2, 109) = 45,124$; $p < 0,001$) dan menjelaskan 45,3% variasi kinerja pengelolaan keuangan, sehingga H_3 diterima. Sisanya ditentukan faktor di luar model. Skor transparansi dan akuntabilitas yang berada pada kategori cukup menunjukkan bahwa kedua praktik itu masih dapat diperkuat.

Bagi kajian pengelolaan keuangan perusahaan, penelitian ini memberi tambahan yang terbatas tetapi dapat dirujuk. Model yang selama ini diuji pada instansi pemerintah dan badan usaha milik desa diuji di sini pada perusahaan swasta berbentuk CV, yang struktur kepemilikannya memisahkan sekutu

komplementer sebagai pengelola dari sekutu komanditer sebagai penyetor modal. Hubungan antara keterbukaan anggaran, pertanggungjawaban, dan penilaian kinerja keuangan ternyata muncul juga pada perusahaan yang tidak diwajibkan membuka anggarannya, sehingga keterbukaan di perusahaan tampaknya berfungsi sebagai pilihan yang mengurangi kesenjangan informasi dengan pemilik modal, bukan sekadar pemenuhan kewajiban. Kedua praktik memberi sumbangan masing-masing walaupun saling berkorelasi, sehingga pada kajian perusahaan kecil keduanya lebih tepat dimodelkan sebagai dua komponen yang saling melengkapi daripada satu ukuran tata kelola tunggal. Instrumen tiga indikator untuk tiap variabel pada tingkat perusahaan (Tabel 1), yang reliabel pada uji coba (Cronbach's alpha 0,82), dapat dipakai atau disesuaikan oleh peneliti lain. Sisa variasi sebesar 54,7% menunjukkan bahwa keterbukaan dan pertanggungjawaban hanyalah sebagian dari penentu pengelolaan keuangan perusahaan, sehingga pengendalian internal dan kompetensi pengelola layak menjadi variabel berikutnya. Karena data berasal dari persepsi satu responden per perusahaan pada satu waktu, kontribusi ini bersifat awal dan hasilnya ditafsirkan sebagai keterkaitan statistik.

Bagi pimpinan dan bagian keuangan perusahaan, hasil ini mengarah pada saran untuk menyampaikan rencana dan realisasi anggaran secara berkala kepada sekutu dan pihak lain yang berkepentingan, menyusun laporan penggunaan dana yang dapat ditelusuri ke dokumen pendukung, dan menindaklanjuti temuan pemeriksaan secara tertulis. Penelitian lanjutan perlu memakai data keuangan yang objektif, lebih dari satu responden per perusahaan, dan teknik penarikan sampel yang memungkinkan generalisasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para direktur, sekretaris, dan staf keuangan perusahaan CV di Kabupaten Kutai Timur yang telah meluangkan waktu mengisi kuesioner dan memberikan penilaian atas pengelolaan keuangan perusahaannya. Terima kasih juga disampaikan kepada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusantara Sangatta atas dukungan dan fasilitas yang diberikan selama penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Adimuntja, R., Setiawan, L., & Karim, A. (2024). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap kinerja anggaran berkonsep value for money pada BUMD Kota Makassar. *Indonesian Journal of Business and Management, 7*(1), 125–133. https://doi.org/10.35965/jbm.v7i1.5210

Ansori, W., Pangaribuan, D., & Nuryati, T. (2026). The effect of participatory budgeting on budget risk avoidance, budget slack and organizational performance accountability. *SAR (Soedirman Accounting Review): Journal of Accounting and Business, 11*(1), 1–16. https://doi.org/10.32424/1.sar.2026.11.1.18830

Asmarawati, B. (2026). Pelaporan keuangan dan implikasinya terhadap evaluasi kinerja keuangan perusahaan. *Management Studies and Entrepreneurship Journal, 7*(2), 1296–1308. https://doi.org/10.37385/msej.v7i2.10240

Auzan, M. Z. (2023). Anteseden value for money pada kinerja keuangan sektor publik di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. *Media Manajemen Jasa, 11*(2), 161–188. https://doi.org/10.52447/mmj.v11i2.7370

Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward a stewardship theory of management. *Academy of Management Review, 22*(1), 20–47. https://doi.org/10.5465/amr.1997.9707180258

Faul, F., Erdfelder, E., Buchner, A., & Lang, A.-G. (2009). Statistical power analyses using G*Power 3.1: Tests for correlation and regression analyses. *Behavior Research Methods, 41*(4), 1149–1160. https://doi.org/10.3758/BRM.41.4.1149

Hamzah, A., Rahmawati, T., Fitriani, C., & Febriansyah, Y. (2024). Determinants of financial performance evaluation in small and medium enterprises. *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan, 7*(2), 463–486. https://doi.org/10.29303/akurasi.v7i2.661

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics, 3*(4), 305–360. https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X

Kawedar, W., & Handayani, R. S. (2025). The role of psychological capital in moderating the effect of budgetary participation on local government performance. *Public and Municipal Finance, 14*(3), 30–43. https://doi.org/10.21511/pmf.14(3).2025.03

Komala, R., & Ihyani, L. (2025). Purbaya Effect dan tertib anggaran publik dalam perspektif Agency Theory dan Stewardship Theory. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora, 11*(4), 388–398. https://doi.org/10.29303/jseh.v11i4.979

Molahosseini, S., & Rajabdorri, H. (2024). The effect of financial accountability and result-oriented culture on organizational performance (Case study: Public sector financial managers). *Scientific Journal of Budget and Finance Strategic Research, 5*(2), 155–177. https://journals.ihu.ac.ir/article_209011.html

Pangaribuan, H., Pangaribuan, B. A., & Siagian, H. L. (2024). The efforts to improve financial performance and managerial performance through participative budgeting and budgetary control. *Distribusi - Journal of Management and Business, 12*(1), 103–116. https://doi.org/10.29303/distribusi.v12i1.506

Panjaitan, R., Sucipto, T. N., & Wardhani, N. S. (2026). The influence of public accountability, transparency, and integrity on the quality of Perumnas financial reports in North Sumatra. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Bisnis Digital, 5*(2), 719–726. https://doi.org/10.37676/jambd.v5i2.11001

Prasetya, W. A., & Puspita, P. (2025). Determinan pengelolaan keuangan BUMDes: Perspektif transparansi dan akuntabilitas. *Borobudur Accounting Review, 5*(1), 43–54. https://doi.org/10.31603/bacr.13952

Sherly, S. G., Widiawati, H. S., & Puspita, E. (2026). Hubungan akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi sumber daya manusia dengan kualitas laporan keuangan UMKM di Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk tahun 2024. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 11*(3), 380–404. https://doi.org/10.23969/jp.v11i03.56266

Soraya Aprilia, A., Blongkod, H., & Pakaya, L. (2026). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran terhadap kinerja keuangan pada organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Gorontalo. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 8*(4), 1899–1912. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v8i4.11531

Wardani, W. C., & Isnowati, S. (2025). Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja keuangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan pengawasan sebagai variabel moderasi. *COSTING: Journal of Economic, Bussines and Accounting, 8*(4), 2282–2298. https://doi.org/10.31539/899s3b76

Wulandari, S., & Eriswanto, E. (2023). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas pengelolaan keuangan pada Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi. *JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Auditing), 4*(2), 275–284. https://doi.org/10.56696/jaka.v4i2.8704

Yao, M., & Xu, Y. (2024). Method bias mechanisms and procedural remedies. *Sociological Methods & Research, 53*(1), 235–278. https://doi.org/10.1177/00491241211043141